

**IMPLEMENTASI PROGAM TRIBINA DI DESA PAMINTANGAN
KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S1) Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

AHMAD SHAUFI

NPM : 2022284

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama :

Nama : Ahmad Shaufi

NPM : 2022284

Progam Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBUNA DI DESA
PAMINTANGAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya, kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan skripsi pada program studi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 11 April 2026

Pembimbing I

Dr. Jumaidi, S.Sos., M.AP.
NUPTK. 4752766667131062

Pembimbing II

Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.AP.
NUPTK. 1162761662130163

Mengetahui,



Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 19921104 201509 1 021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGAM TRIBINA DI DESA PAMINTANGAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai..
3. Bapak Dr. Jumaidi, S.Sos., M.AP, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis.
4. Bapak Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.AP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis.
5. Seluruh dosen dan staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
6. Orang tua penulis yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis.
7. Dan teman-teman di STIA Amuntai, terima kasih atas dukungan motivasinya

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat proposal skripsi ini, namun jika ada kesalahan dalam konteks isi maupun tata cara penulisan maka itu adalah keterbatasan penulis semata. Oleh karena itu, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusa Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Kebijakan Publik	13
2. Partisipasi Masyarakat	15
3. Pemberdayaan Masyarakat	16
4. Progam Tribina	17
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Tipe Penelitian	25
D. Data dan Sumber Data	25
E. Desain Operasional Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	30
H. Uji Kredibilitas Data	33
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses yang berkelanjutan dan terencana, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka pembangunan tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi utama yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat di Indonesia telah menjadi agenda prioritas dalam berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang menonjol dalam konteks ini adalah Program Tribina, yang terdiri dari Bina

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program Tribina merupakan inovasi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan berbasis keluarga, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Kondisi ideal yang diharapkan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Tribina adalah terciptanya masyarakat yang mandiri, sehat, berpendidikan, dan memiliki daya saing tinggi. Program Bina Keluarga Balita (BKB) misalnya, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak usia dini, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sementara itu, Bina Keluarga Remaja (BKR) difokuskan pada pembinaan remaja agar mampu menghadapi tantangan masa depan dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat. Adapun Bina Keluarga Lansia (BKL) diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Dengan demikian, Program Tribina diharapkan mampu menciptakan siklus kehidupan keluarga yang sehat, produktif, dan harmonis, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan Implementasi Program Tribina masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan di lapangan. Berdasarkan pengamatan awal penulis di Desa Pamintangan

Kecamatan Amuntau Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa fenomena masalah yaitu:

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari Program Tribina, sehingga kurang aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, masyarakat lebih memilih fokus pada pencarian nafkah daripada kegiatan yang dianggap kurang mendesak tanpa insentif langsung seperti bantuan pangan, pelatihan praktis, atau uang transport sehingga membuat minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Tribina di Desa Pamintangan. Selain itu, sebagian besar masyarakat desa Pamintangan juga merupakan pekerja kantor dimana hal ini menjadi salah satu alasan kenapa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Tribina di Desa Pamintangan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini juga menjadi hambatan utama dalam pengimplementasian program Tribina, di mana kurangnya tenaga ahli atau fasilitator yang menjangkau di tingkat desa membuat sosialisasi dan pelatihan bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL) sering kali dilakukan oleh kader yang tidak kompeten, sehingga materi yang disajikan kurang efektif dan menarik. Selain itu, ada juga kader yang hanya terdaftar di SK namun tidak ikut serta dalam melaksanakan kegiatan Tribina setiap bulannya di kantor Desa Pamintangan, sehingga beban tanggungjawab

kader tersebut dilimpahkan kepada kader lain yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Tribina di Desa Pamintangan.

3. Sarana dan Prasarana yang kurang Memadai. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang utama dalam keberhasilan implementasi suatu program pembangunan berbasis masyarakat, termasuk Program Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia). Keterbatasan sarana dapat dilihat dari minimnya fasilitas pendukung kegiatan, seperti kurangnya alat peraga edukasi, media penyuluhan, serta perlengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh kader maupun pelaksana program. Kondisi ini menyebabkan proses penyampaian materi kepada masyarakat menjadi kurang optimal, sehingga informasi yang diterima tidak sepenuhnya dipahami oleh sasaran program, fenomena keterbatasan sarana dan prasarana ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga berdampak pada tingkat partisipasi dan keberlanjutan program.
4. Keterbatasan Anggaran. Pada dasarnya, keterbatasan anggaran ini berdampak langsung terhadap berbagai aspek pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan Program Tribina tidak selalu menjadi prioritas utama dalam penganggaran, sehingga dana yang dialokasikan cenderung minimal. Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya insentif bagi kader atau pelaksana program, sehingga dapat menurunkan motivasi dan kinerja mereka dalam menjalankan kegiatan Tribina. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan

penyuluhan yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan menjadi terbatas frekuensinya akibat kendala biaya operasional.

Berdasarkan dari fenomena masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “**Implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara**”.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penelitian adalah dengan menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian, sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Dalam hal ini fokus penelitian mengambil model teori implementasi kebijakan menurut Donald P. Warwick (1979) dalam Subianto (2020: 50) dalam karyanya *Integrating Planning and Implementation: "A Transactional Approach"* mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Kemampuan Organisasi
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian Potensi

C. Rumusa Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis ambil berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari pelaksanaan Progam Tribina (BKB, BKR, dan BKL) di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam implementasi progam Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi Progam Tribina (BKB, BKR dan BKL) di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam implementasi Progam Tribina (BKB, BKR, dan BKL) di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan, pemahaman, penalaran, dan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis serta penelitian yang sejenis, sehingga mampu

menghasilkan penelitian- penelitian yang lebih mendalam terutama mengenai Implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat praktis

Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara lebih mendalam tentang Implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. (Safitri et al., 2025)

Judul :

IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBINA, BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), DAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DI DESA PANGGANDINGAN KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Rumusab Masalah :

- a. Kurangnya motivasi, apresiasi, dukungan, pelatihan, dan sarana pendukung dalam pelaksanaan progam Tribina di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara
- b. Keterbatasan dana yang diterima dari pihak pusat, dimana hal ini berdampak pada pengurangan jumlah pertemuan dan insentif yang diberikan kepada para kader, yang pada akhirnya mempengaruhi semangat mereka dalam melaksanakan tugas

Hasil Penelitian:

Impelementasi Program Tribina (BKB, BKR, BKL) di Desa Panggandingan dilihat dari teori warwick (kaji, 2015: 70) yang Pertama dari sub variabel Kemampuan organisasi indikator kemampuan teknis cukup baik dan memadai dengan pelatihan dan pendampingan yang telah

diberikan, para kader mampu menjalankan program Tribina secara efektif. Yang kedua dari dilihat dari indikator koordinasi bahwa Koordinasi yang terjalin antara pemerintah desa, PKB, dan kader Tribina di Desa Panggandingan telah mendukung implementasi Program Tribina secara efektif dan efisien. Pelaksanaan peran masing-masing pihak serta evaluasi rutin menjadi fondasi keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas keluarga di desa tersebut. Yang ketiga dilihat dari Indikator Standard Operating Procedure (SOP) Diperlukan upaya penegasan kembali peran dan tugas masing-masing kader, penguatan pengawasan, serta evaluasi berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan program Tribina. Yang kedua sub variabel Informasi dilihat dari indikator Penyaluran Informasi yang dimana program TRIBINA di Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara, dilakukan secara terencana dengan melibatkan berbagai metode, seperti pertemuan rutin, penyuluhan, kunjungan rumah, dan pengumuman publik. Pendekatan ini melibatkan peran aktif kader dan masyarakat, sehingga informasi dapat diterima dengan baik. Hal ini mendukung pencapaian tujuan program secara efektif. Namun dalam indikator Meskipun sudah efektif, ditemukan beberapa kendala, seperti sebagian warga yang masih kesulitan memahami informasi. Namun, kejelasan informasi perlu disempurnakan agar dampaknya dapat lebih optimal bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga sub variabel Dukungan dilihat dari indikator sikap masyarakat menunjukkan dukungan yang kuat dan sikap yang positif terhadap implementasi Program Tribina (BKB,

BKR, BKL). Dukungan ini muncul karena masyarakat menyadari manfaat nyata program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan. Dalam indikator partisipasi masyarakat Desa Panggandingan yang aktif berpartisipasi dalam program Tribina (BKB, BKR, BKL) merasakan dampak positif yang signifikan. Program ini membantu meningkatkan pemahaman tentang pengasuhan anak, mendukung perawatan lansia, serta memberikan pendampingan kepada remaja. Selain menjadi penerima manfaat, masyarakat juga berperan sebagai agen perubahan, menciptakan komunitas yang lebih harmonis, sehat, dan berdaya. Namun, berdasarkan hasil observasi, meskipun program ini memberikan dampak positif, terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli atau acuh terhadap pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan lebih intensif agar program Tribina dapat menjangkau dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Yang ke empat sub variabel Pembinaan potensi dilihat dari indikator Komitmen pelaksana program di Desa Panggandingan berjalan dengan baik. Terdapat kesepakatan yang kuat di antara pihak-pihak terkait untuk memajukan desa dan wilayah Kecamatan Daha Utara. Setiap jabatan di desa memiliki tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa, yang mendukung pelaksanaan program secara penuh tanggung jawab. Komitmen ini sangat penting untuk mendorong perkembangan dan keberhasilan program di desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara. Dan dilihat dari indikator Tanggung Jawab (Fragmentasi) komitmen pelaksana dalam membina kader dan

memastikan program Tribina terlaksana sesuai target sudah berjalan dengan baik. Ini terlihat dari pembinaan bulanan, monitoring dan evaluasi kinerja, serta penanganan kendala teknis seperti keterlambatan input data. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan signifikan, seperti kekurangan kader, tingginya pergantian kader, serta perbedaan kemampuan kader dalam menguasai teknologi. Kendala ini memengaruhi efisiensi dan efektivitas program secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kader dan pengelolaan beban kerja yang lebih merata untuk mendukung keberhasilan program Tribina secara berkelanjutan.

2. (Munawarah, 2025)

Judul:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM TRIBINA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA) DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(STUDI KASUS DESA DARUSSALAM, DESA PALUKAHAN DAN DESA PANDAMAAN)

Rumusan Masalah:

Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kelompok kegiatan Tribina

Hasil Penelitian:

Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Program Tribina Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang partisipasi dan dapat dilihat dari beberapa indikator yang

belum optimal yaitu: Sosialisasi masih belum optimal dimana sosialisasi penyampaian informasi belum terlalu jelas karena sosialisasi di lakukan sudah lama sejak tribina di tetapkan pemerintah. Jadi tidak semua masyarakat tahu tentang informasi tersebut. Memberikan gagasan/ide belum optimal tentang pelaksanaan program tribina karena rata-rata dari mereka hanya memberikan gagasan bukan memberikan ide untuk pelaksanaan kegiatan program Tribina. Kesiadaan masyarakat tentang pelaksanaan program tribina belum optimal karena rata-rata dari mereka hanya sebagian yang bersedia untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan program Tribina. Yang sudah optimal yaitu pada indikator: Memberikan informasi, memberikan pendapat, memberikan umpan balik, pengambilan keputusan, bekerjasama, bertindak bersama, memberikan dukungan. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di antaranya Tingkat Ekonomi, Kemampuan untuk berpartisipasi, dan Kurangnya Dukungan Atau Kemauan Dari Diri Sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat. di antaranya meningkatkan sosialisasi dan informasi di kalangan masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi mereka dan mengetahui lagi informasi mengenai pelaksanaan program tribina, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi kepada masyarakat dengan cara mengajak kembali dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan tribina salah satu upaya yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan tribina, dan memberikan dukungan mengenai pelaksanaan kegiatan salah satu upaya yang bisa mempengaruhi

partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan tribina tersebut.

Adapun penelitian yang sedang dilakukan ini yaitu tentang Implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai perbedaan sebagai berikut:

1. Teori dan indikator yang digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan implementasi yaitu berdasarkan model teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mencakup 4 indikator.
2. Belum pernah ada yang meneliti tentang Implementasi Progam Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Selain itu, terdapat persamaan penelitian yang menjadikannya relevan dengan penelitian saya yaitu diantaranya :

1. Pada penelitian sebelumnya menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif sebagai dasar dari penelitian tersebut
2. Penelitian kedua sama-sama menggunakan jenis teknik pengambilan sampel dengan metode *nonprobability sampling* yang digunakan yakni *porpusive sampling*.
3. Penelitian pertama sama-sama membahas implementasi progam Tribina.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan macam-macam keputusan yang saling berkaitan yang dibuat oleh instansi dan pejabat pemerintah. Dalam perspektif teoritis, menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*” yang artinya apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan hanya terkait program yang dijalankan, tetapi juga keputusan pemerintah untuk tidak bertindak dalam suatu isu. Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eulau & Prewitt (1973: 465) yang menyatakan Kebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Artinya, kebijakan bukan hanya sekadar keputusan sekali jadi, tetapi merupakan pedoman yang terus diterapkan dalam tindakan sehari-hari sehingga mencerminkan kesepakatan dan keteraturan dalam pelaksanaannya.

b. Proses dan Tahapan Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik secara umum dipahami melalui *policy cycle* yang terdiri dari beberapa tahap: identifikasi masalah, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Dunn, 2018). Pendekatan siklus ini membantu peneliti maupun

praktisi untuk memahami dinamika kebijakan sebagai proses yang berkesinambungan. Di Indonesia, kebijakan publik dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu keputusan atau aturan yang dibuat oleh pihak tertentu untuk dijadikan pedoman dalam bertindak dan menyelesaikan suatu masalah. Kebijakan biasanya bersifat tetap dan dijalankan secara konsisten agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Implementasi kebijakan publik Merujuk pada proses mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata oleh aktor-aktor seperti pemerintah, birokrasi, dan masyarakat (Hupe, 2009). Dalam buku karya Michael Hill dan Peter Hupe, implementasi digambarkan sebagai tahap di mana kebijakan yang dirancang di tingkat atas (top-down) harus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Artinya, kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak atasan tidak hanya berhenti sebagai rencana, tetapi benar-benar diterapkan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan dan pelaksanaan kebijakan harus disesuaikan dengan

situasi nyata agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Partisipasi Masyarakat

a. Definisi Partisipasi

“Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, *‘Participation’* yang artinya pengambilan bagian, pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut serta bertanggung jawab didalamnya” (Handayani, 2023).

Sementara Verhangen (Suaib, 2023:60) mendefinisikan partisipasi sebagai “bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu”. Sedangkan menurut Theodorson, di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, “partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. (Handini, S. et al. 2019:23).

Berdasarkan pengertian diatas, partisipasi adalah bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Partisipasi tidak hanya berarti hadir, tetapi juga ikut mengambil peran dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, di luar dari pekerjaan atau profesi utama yang dimiliki.

b. Definisi Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat menekankan pada ‘Partisipasi’ warga secara langsung di lembaga dan dalam proses

pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, menurut Dewi dan Nulul “partisipasi masyarakat merupakan sebuah keputusan masyarakat sebagai individu yang melibatkan aktivitas komunikasi di dalamnya”(Aksal Mursalat, 2023:78).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kepentingannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi ini juga merupakan keputusan sadar dari setiap individu untuk ikut terlibat, yang di dalamnya terdapat proses komunikasi antara masyarakat dan pihak pemerintah. Dengan adanya partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan Merujuk pada proses di mana individu, kelompok, atau komunitas memperoleh kendali atas kehidupan mereka sendiri, termasuk akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan kekuasaan. Dalam buku *Pedagogy of the Oppressed* , Freire mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses penyediaan manusia

dari struktur yang terjadi melalui pendidikan kritis. Pemberdayaan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan dialog reflektif yang membangun kesadaran kritis untuk mengubah realitas sosial. Ini menekankan aspek transformasional, di mana individu menjadi subjek aktif dalam perubahan.

b. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses di mana individu atau kelompok diberikan kekuatan untuk mengontrol sumber daya, membuat keputusan, dan mengatasi masalah sosial-ekonomi. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula (Saufiah, 2024). Artinya, masyarakat perlu ikut merencanakan kegiatan, menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, sampai melaksanakan dan mengevaluasi program yang ada. Jika masyarakat tidak ikut serta, maka program pemberdayaan bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada kemauan, kesadaran, dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Semakin besar keterlibatan masyarakat, maka semakin besar pula peluang program tersebut berhasil dan memberikan dampak yang nyata.

4. Program Tribina

Tribina adalah salah satu program utama yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka membangun dan meningkatkan ketahanan serta

kesejahteraan keluarga. Kata Tribina sendiri merupakan gabungan dari tiga jenis kegiatan pembinaan keluarga, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada keluarga agar dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tahapan usia anggota keluarganya.

Melalui kegiatan Tribina, keluarga diberikan edukasi, pendampingan, dan berbagai aktivitas yang mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini, pembinaan mental dan sosial anak remaja, hingga perawatan yang tepat bagi anggota keluarga yang sudah lanjut usia. Dengan demikian, Tribina tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari perhatian negara terhadap kualitas keluarga Indonesia secara menyeluruh.

a. Bina Keluarga Balita

BKB merupakan salah satu bagian dari Tribina yang khusus mengelola tentang pembinaan terhadap balita, yaitu anak yang berusia 0 sampai 5 tahun. Dalam program ini, orang tua khususnya ibu diberikan pembinaan dan informasi mengenai pola asuh anak yang benar, mulai dari cara memberi makan, cara berkomunikasi dengan anak, pemberian rangsangan untuk tumbuh kembang, hingga pemantauan kesehatan anak secara berkala. Tujuan dari BKB yaitu untuk menambah wawasan serta meningkatkan ketrampilan orangtua dalam mengasuh balitanya. Pembinaan tersebut meliputi

pola asuh balita, perhatian orang tua terhadap fungsi motorik balita, gizi seimbang bagi balita, dan lain-lain. Hubungan antara orangtua dan balita memiliki pengaruh yang besar bagi balita untuk masa mendatang.

b. Bina Keluarga Remaja

Bina Keluarga Remaja atau BKR adalah program pembinaan yang diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anak remaja, biasanya yang berusia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa yang sangat penting karena pada fase ini, seseorang mengalami banyak perubahan baik fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam membimbing, mengawasi, dan mendampingi remaja agar tidak salah arah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Terdapat 4 (empat) upaya pokok keluarga berencana nasional, diantaranya adalah pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan 4 upaya pokok program keluarga berencana nasional, maka dibentuk BKR (Bina Keluarga Berencana), tujuan dari program BKR adalah untuk meningkatkan ketrampilan orangtua maupun anggota keluarga lainnya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada remaja sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan memiliki kualitas yang baik. Program BKR juga berperan dalam

mendukung Generasi Berencana (Genre), yaitu program yang mengajak remaja untuk merencanakan masa depannya dengan baik, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Remaja diajarkan untuk mengenali perubahan dalam dirinya dan diajak untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki cita-cita.

c. Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia atau BKL adalah program pembinaan yang diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (lansia). Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas dan bagian dari keluarga yang tetap harus diperhatikan dan diberdayakan. Dalam program BKL, keluarga diajak untuk memahami kebutuhan lansia, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Di dalam kegiatan BKL, terdapat pembinaan yang berkaitan dengan pembinaan fisik bagi lansia. Pembinaan tersebut mempertimbangkan faktor usia dan kondisi fisik yang berbeda-beda setiap orang. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan atau penanganan kepada lansia sesuai dengan kebutuhan secara maksimal. BKL bertujuan untuk membangun kesadaran keluarga agar tidak mengabaikan lansia, serta menciptakan lingkungan yang ramah lansia, di mana mereka tetap merasa dihargai dan memiliki peran dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya BKL, diharapkan lansia dapat menjalani masa tuanya dengan sehat, bahagia, dan bermartabat.

Secara umum, Program Tribina (BKB, BKR, dan BKL) merupakan strategi pemerintah dalam membangun kualitas keluarga Indonesia dengan pendekatan yang menyeluruh dari usia balita, remaja, hingga lansia. Setiap tahapan usia memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, dan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Melalui kegiatan yang dilakukan dalam Tribina, keluarga diharapkan mampu mengasuh anak secara optimal, mendampingi remaja agar terhindar dari hal-hal negatif, dan merawat lansia dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Program ini merupakan upaya konkrit dalam menciptakan keluarga yang tangguh, harmonis, dan sejahtera, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya masyarakat dan bangsa yang kuat.

C. Kerangka Pemikiran

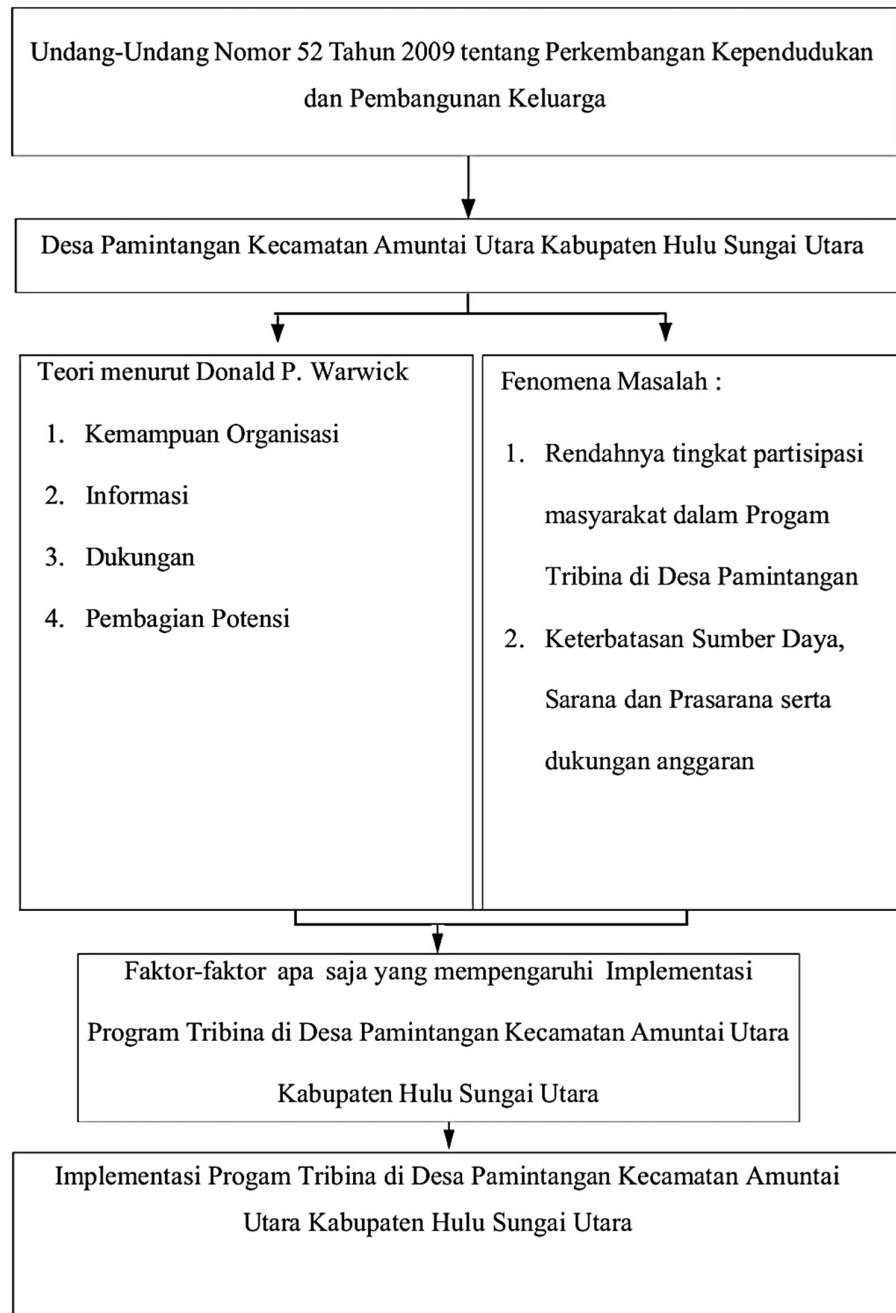
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem informasi Keluarga, maka pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan program pembinaan keluarga berkelanjutan yang dikenal dengan nama Program Tribina, yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan, serta bagaimana faktor-faktor pendukung maupun penghambat memengaruhi pencapaian tujuan program tersebut.

Teori yang penulis pakai yaitu teori model implementasi kebijakan menurut Donald P. Warwick bahwa kinerja suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Kemampuan organisasi, dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Ada tiga komponen utama yang diyakini dapat membentuk kapabilitas atau kemampuan organisasi, antara lain:
 - a. Kemampuan teknis
 - b. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain
 - c. Sistem pelayanan "SOPs" (Standar Operating Procedures), yang merupakan pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Informasi, komponen informasi menjadi penting karena kurangnya pengetahuan dapat berdampak pada kebijakan secara keseluruhan.
3. Dukungan, kurangnya objek kebijakan "terikat" dengan tugas/kewajiban tertentu, kemudian kepatuhan juga akan berkurang jika ketentuan dalam kebijakan yang ada bertentangan dengan keyakinan atau penilaian yang sebelumnya dibuat.
4. Pembagian potensi, hambatan dapat terjadi apabila terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang masih kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang ambigu serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos. 71271.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2025) mengatakan:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Demikian, dikatakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini dalam bentuk memberikan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisis data serta mengungkapkan secara jelas tentang Implementasi Progam Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Sugiyono (2025) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sifatnya deskriptif sebab data yang dikumpulkan bentuknya kata-kata ataupun gambar sehingga tidak menekankan pada angka atau dengan kata lain menekankan pada makna yang dideskripsikan.

Dengan menggunakan tipe penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan implementasi Progam Tribina dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di lapangan oleh peneliti yang bersumber dari beberapa informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung memberikan

keterangan maupun data yang mendukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan baik berupa buku-buku, jurnal dan lainnya. Serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu juga didapat dari literatur di internet, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini yakni dari informan maupun dengan studi kepustakaan.

1. Informan

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu *Purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik penarikan data yang dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi atau keseluruhan dari sumber data yang ada dengan pertimbangan yang didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Desa Pamintangan	1 Orang
2	Sekretaris Desa Pamintangan	1 Orang
3	Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Utara	1 Orang
4	Kader BKB	1 Orang
5	Kader BKR	1 Orang
6	Kader BKL	1 Orang
7	Masyarakat Desa Pamintangan	7 Orang
Jumlah Informan		13 Orang

Sumber: Dibuat penulis, Tahun 2026

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan audio maupun video. Menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat- sifat yang diamati. Desain operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti dalam pelaksanaan penelitian. Desain operasional penelitian bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini, peneliti berusaha membuat definisi operasional sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian saat melaksanakan wawancara kepada informan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Teori Implementasi Menurut Donald P. Warwick	Kemampuan Organisasi	1. Kemampuan Teknis
		2. Kualitas SDM
		3. SOP
	Informasi	1. Ketersediaan Data
		2. Penyampaian Informasi
		3. Feedback
	Dukungan	1. Dukungan Politik
		2. Dukungan Masyarakat
		3. Dukungan Ekonomi
	Pembagian Potensi	1. Distribusi Kekuasaan
		2. Alokasi Sumber Daya

Sumber: Dibuat Penulis, Tahun 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Dalam menulis maupun karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat.

Menurut Sugiyono (2023:296) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Secara sederhana observasi diartikan sebagai cara melihat, memperhatikan, dan mencatat sesuatu yang ada di sekitar.

Menurut Riyanto dalam Hardani, dkk. (2020:125) ‘Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebelumnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksananannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan’.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, maupun audio visual.

Menurut Nazir dalam Hardani, dkk. (2020:138) ‘Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau

pewawancara dengan si penjawab atau reponden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)'.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk gambar, kutipan, buku dan bahan referensi lain yang dapat mendukung penelitian.

Menurut Hardani, dkk. (2020:149-150) "Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data- data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama."

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian metode kualitatif ini menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

"Analisis data bersifat induktif yakni analisis berdasarkan data yang didapatkan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum, selama, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, menurut Nasution (1988) menyatakan "analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*". ... Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan”.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles & Huberman. Menurut Miles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2025) mengatakan bahwa: “aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis data ini yakni: *data reduction* (reduksi data); *data display* (penyajian data); dan *conclusion drawing/verification*”.

1. Reduksi Data

Reduksi data menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi”.

Namun dalam hal ini, ada pembaharuan teori oleh Miles dan Huberman pada tahun 2014, Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Perbedaan dengan yang lama adalah *data reduction* diganti dengan *data condensation*. Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data hasil dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih mantap/kuat”.

2. Penyajian Data

Penyajian data menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, menurut Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut”.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Conclusion Drawing/Verification menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2023:365-371) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun sumber baru. Dengan Perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data atau urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik Amuntai*: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Anonim. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1–106.
- Anonim. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1–18.
- Dr. A. Hasdiansyah, S.Pd., M. . (2023). Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat. In *CV. Eureka Media Aksara*.
- Handayani, P. (2023). Partisipasi dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat dan Orang Dewasa.
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu
- Hill, H. & M. (2009). *Implementing Public Policy*.
- Husnatul Hidayah, (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa mundar kecamatan lampihong kabupaten balangan. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1, 101–107.
- Leo Agustino, P. D. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi KE-2*. ALFABETA, cv.
- Munawarah. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Tribina Bina Keluarga Balita , Bina Keluarga Remaja , Bina Keluarga Lansia di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Darussalam , Desa

Palukahan Dan Desa Pandamaan). *Journal of Development Administrations Thinking Understand : Publik and Business Administration*, 1, 80–86.

Nurjannah, N. R. (2025). Implementasi Program Tribina dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(2), 228–244.

Safitri, D. (2025). Implementasi Progam Tribina, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2, 598–611.

Saufiah, R.,. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 634–644.

Soetari, E. (2014). Kebijakan Publik. In *Pustaka Setia Bandung*.

Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. AFLABETA , cv.

Sugiyono, P. D. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitratif, dan R&D*. ALFABETA, cv.